



DINAS KOMINFO

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

RANCANGAN AKHIR RENJA 2025

**RENCANA KERJA DINAS KOMINFO
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**Alamat : Jl. Beringin, Komp.
Perkantoran
Kuala Tungkal 36513**
**Email :
diskominfo@tanjabbarkab.go.id**
Website : www.tanjabbarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2025 ini menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sekaligus sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD).

Kami berharap RancanganRenja Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berguna dalam pencapaian target pembangunan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Juli 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



JOAN PRAYUDA, SE., MM
Peminda Tk.I (IV/b)
19810829 201001 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN PREDIKSI TAHUN BERJALAN	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023	8
2.2 Prediksi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	16
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	35
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	37
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	40
3.2 Sinkronisasi Program Antara RPJM, RENSTRA dan RKA	41
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	43
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan.....	47
4.2 Rumusan Rencana Pendanaan.....	50
 BAB V PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra OPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, serta menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rancangan Renja 2025 dimulai dengan persiapan penyusunan, mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun sebelumnya dan tahun berjalan akan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan RKPD yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan RKPD;

- b. Rumusan program / kegiatan di dalam Rancangan Renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rancangan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD;
- d. Rumusan program / kegiatan didalam Rancangan Renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran dan total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Rancangan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD yang menjadi acuannya. Renja Perangkat Daerah memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD, RTRW dan RPJPD. Sebaliknya Rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, KUA-PPAS dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021);
21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 51);

22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi pada tahun 2025.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengevaluasi RENJA Dinas Kominfo tahun sebelumnya;
2. Sebagai salah satu acuan penyusunan program dan kegiatan Dinas Kominfo tahun 2025;
3. Merencanakan program dan kegiatan Dinas Kominfo tahun 2025;
4. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Kominfo Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN PREDIKSI

TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2 Prediksi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Sinkronisasi Program Antara RPJMD, RENJA dan RKA
3.3	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1	Program dan Kegiatan
4.2	Rumusan Rencana Pendanaan
BAB V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN PREDIKSI TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/ atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan ditinjau dari Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

NO.		URAIAN			Sudah / Belum Mencapai Target
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tercapai
	Anggaran	63.920.000			
	Realisasi	63.880.000			
	Persentase Realisasi	99,94%			
2.	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tercapai
	Anggaran	34.000.000			
	Realisasi	34.000.000			
	Persentase Realisasi	100,00%			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
3.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tercapai
	Anggaran	3.217.254.856			
	Realisasi	3.002.106.748			
	Persentase Realisasi	93,31%			
4.	Sub Kegiatan	Penyediaan	Administrasi	Pelaksana	Tercapai
		Tugas ASN			
	Anggaran	170.080.000			
	Realisasi	170.080.000			
	Persentase Realisasi	100,00%			

5.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belum Tercapai
	Anggaran	45.849.900	
	Realisasi	43.035.000	
	Persentase Realisasi	93,86%	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
6.	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapai
	Anggaran	27.000.000	
	Realisasi	27.000.000	
	Persentase Realisasi	100,00%	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7.	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belum Tercapai
	Anggaran	4.955.750	
	Realisasi	4.955.750	
	Persentase Realisasi	100,00%	
8.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belum Tercapai
	Anggaran	59.432.000	
	Realisasi	59.432.000	
	Persentase Realisasi	100,00%	
9.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercapai
	Anggaran	18.000.000	
	Realisasi	17.990.000	
	Persentase Realisasi	99,94%	
10.	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belum Tercapai
	Anggaran	24.165.900	
	Realisasi	24.165.900	
	Persentase Realisasi	100,00%	
11.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belum Tercapai
	Anggaran	6.000.000	
	Realisasi	4.200.000	
	Persentase Realisasi	70,00%	
12.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapai
	Anggaran	503.979.550	
	Realisasi	503.535.330	

	Persentase Realisasi	99,91%			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
13.	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Belum Tercapai
	Anggaran	58.273.000			
	Realisasi	58.250.000			
	Persentase Realisasi	99,96%			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
14.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Belum Tercapai
	Anggaran	2.850.000			
	Realisasi	2.830.000			
	Persentase Realisasi	99,30%			
15.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tercapai
	Anggaran	40.755.000			
	Realisasi	40.755.000			
	Persentase Realisasi	100,00%			
16.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tercapai
	Anggaran	91.200.000			
	Realisasi	88.512.471			
	Persentase Realisasi	99,05%			
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
17.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Tercapai
	Anggaran	165.194.000			
	Realisasi	164.465.100			
	Persentase Realisasi	99,56%			
18.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Tercapai
	Anggaran	34.994.400			
	Realisasi	34.748.000			
	Persentase Realisasi	99,95%			
19.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Belum Tercapai
	Anggaran	46.000.000			
	Realisasi	45.939.000			
	Persentase Realisasi	99,87%			

2.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				
20.	Sub Kegiatan	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Belum Tercapai
	Anggaran	45.875.000		
	Realisasi	40.805.000		
	Persentase Realisasi	88,95%		
21.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Tercapai
	Anggaran	109.200.000		
	Realisasi	109.200.000		
	Persentase Realisasi	100,00%		
22.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Belum Tercapai
	Anggaran	39.450.000		
	Realisasi	37.408.250		
	Persentase Realisasi	94,82%		
23.	Sub Kegiatan	Pelayanan Informasi Publik		Tercapai
	Anggaran	44.484.000		
	Realisasi	43.433.250		
	Persentase Realisasi	97,64%		
24.	Sub Kegiatan	Layanan Hubungan Media		Tercapai
	Anggaran	2.572.200.000		
	Realisasi	2.571.259.351		
	Persentase Realisasi	99,96%		
25.	Sub Kegiatan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Belum Tercapai
	Anggaran	377.826.000		
	Realisasi	337.680.054		
	Persentase Realisasi	99,96%		
26.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Tercapai
	Anggaran	54.999.800		
	Realisasi	51.094.800		
	Persentase Realisasi	92,90%		
3.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
27.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Belum Tercapai

	Anggaran	1.671.344.000		
	Realisasi	1.671.052.500		
	Persentase Realisasi	99,98%		
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
28.	Sub Kegiatan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belum Tercapai	
	Anggaran	118.220.000		
	Realisasi	118.200.000		
	Persentase Realisasi	99,98%		
29.	Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tercapai	
	Anggaran	77.899.800		
	Realisasi	77.805.000		
	Persentase Realisasi	99,88%		
30.	Sub Kegiatan	Pengelolaan e-Government Chief Information Officer (GCIO)	Tercapai	
	Anggaran	48.199.800		
	Realisasi	48.140.000		
	Persentase Realisasi	99,88%		
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
31.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Belum Tercapai	
	Anggaran	39.700.000		
	Realisasi	39.450.000		
	Persentase Realisasi	99,37%		
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
28.	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Belum Tercapai	
	Anggaran	37.599.800		
	Realisasi	37.399.800		
	Persentase Realisasi	99,47%		

Review atas pelaksanaan program dan kegiatan diatas memperlihatkan bahwa mayoritas pelaksanaan program/ kegiatan telah mencapai target.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Serapan anggaran: 93,86%
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Serapan anggaran: 100%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Serapan anggaran: 100%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Serapan anggaran: 70,00%
Alasan: Pelaksanaan kegiatan untuk langganan surat kabar dilaksanakan di akhir tahun anggaran.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Serapan anggaran: 100 %
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Serapan anggaran: 99,96%
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Serapan anggaran: 99,30%
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Serapan anggaran: 99,87%
9. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.
Serapan anggaran: 88,95%

10. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Serapan anggaran: 94,82%
11. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan Layanan Hubungan Media.
Serapan anggaran: 99,96%
12. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.
Serapan anggaran: 99,96%
13. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Serapan anggaran: 99,98%
14. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Serapan anggaran: 99,98%
15. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
Serapan anggaran: 99,37%

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggeser anggaran pada beberapa kegiatan yang anggarannya berupa honorarium tim pelaksana kegiatan. Program atau kegiatan dapat tercapai sesuai anggaran namun pencapaian target Perjanjian Kinerja OPD tidak Optimal, sehingga dilakukan perubahan target.

2.2 Prediksi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A.1 Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Prediksi : 100%

Anggaran : 20,300,000

A.2 Sub Kegiatan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Prediksi : 100%

Anggaran : 59,850,000

A.3 Sub Kegiatan:

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Prediksi : 100%

Anggaran : 27,900,000

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

B.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Prediksi : 100%

Anggaran : 3,557,248,813

B.2 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Prediksi : 100%

Anggaran : 229,200,000

B.3 Sub Kegiatan:

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Prediksi : 100%

Anggaran : 44,620,000

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

C.1 Sub Kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Prediksi : 100%

Anggaran : 60,000,000

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

D.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Prediksi : 100%
Anggaran : 4,463,750

D.2 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Prediksi : 100%
Anggaran : 62,153,000

D.3 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Prediksi : 100%
Anggaran : 16,010,000

D.4 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Prediksi : 100%
Anggaran : 21,800,000

D.5 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Prediksi : 100%
Anggaran : 6,000,000

D.6 Sub Kegiatan:

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Prediksi : 100%
Anggaran : 458,921,300

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

E.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Prediksi : 100%
Anggaran : 3,500,000

E.2 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Prediksi : 100%
Anggaran : 84,984,000

E.3 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Prediksi : 100%
Anggaran : 88,877,000

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

F.1 Sub Kegiatan:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Prediksi : 100%
Anggaran : 31,663,000

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

G.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Prediksi : 100%
Anggaran : 173,710,400

F.2 Sub Kegiatan:

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Prediksi : 100%
Anggaran : 36,270,000

F.3 Sub Kegiatan:

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Prediksi : 100%
Anggaran : 89,695,000

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Kegiatan:

A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

A.1 Sub Kegiatan:

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Prediksi : 100%
Anggaran : 51,315,000

A.2 Sub Kegiatan:

- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Prediksi : 100%

Anggaran : 115,600,000

A.3 Sub Kegiatan:

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Prediksi : 100%

Anggaran : 44,320,000

A.4 Sub Kegiatan:

- Pelayanan Informasi Publik

Prediksi : 100%

Anggaran : 49,020,000

A.5 Sub Kegiatan:

- Layanan Hubungan Media

Prediksi : 100%

Anggaran : 2,453,450,000

A.6 Sub Kegiatan:

- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Prediksi : 100%

Anggaran : 299,490,000

A.7 Sub Kegiatan:

- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Prediksi : 100%

Anggaran : 52,916,000

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan:

- A. Pengelolaan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

A.1 Sub Kegiatan:

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Prediksi : 100%

Anggaran : 2,667,683,000

- B. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B.1 Sub Kegiatan:

- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Prediksi : 100%

Anggaran : 95,000,000

B.2 Sub Kegiatan:

- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Prediksi : 100%

Anggaran : 70,100,000

B.3 Sub Kegiatan:

- Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Prediksi : 100%

Anggaran : 53,800,000

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan:

A. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

A.1 Sub Kegiatan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Prediksi : 100%

Anggaran : 82,600,000

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan:

A. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

A.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Prediksi : 100%

Anggaran : 47,350,000

Tabel 2.2
Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Periode Pelaksanaan : 2 Januari s.d Desember 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		unit Perangkat daerah yang bertanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD	600%	109.186.806.401	200%	20.985.495.422	100%	9.850.902.556	10,20%	1.004.484.923	29,60%	2.915.755.401	23,48%	2.313.087.336	34,31%	3.379.710.644	97,59%	9.613.038.304	30.598.533.726	50%	28,02%	Diskominfo	
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, akuntabilitas kinerja aparatur dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD	600%	32.286.957.551	200%	9.893.782.462	100%	4.613.904.356	13,84%	638.486.518	33,80%	1.559.565.401	17,85%	823.739.536	29,66%	1.368.318.844	95,15%	4.390.110.299	14.283.892.761	49%	44,24%	Diskominfo	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		600%	666.520.000	200%	120.735.250	100%	97.920.000	23,86%	23.365.000	27,53%	26.960.000	17,69%	17.325.000	30,87%	30.230.000	99,96%	97.880.000	218.615.250	50%	32,80%	Diskominfo	
		Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Renja, RKA, RKAP, Lakip dan Laporan kegiatan akhir tahun	30	371.520.000	5	120.735.250	5	63.920.000	2	15.315.000	1	20.010.000	1	9.825.000	1	18.730.000	5	63.880.000	184.615.250	33%	49,69%	Diskominfo	

		Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%	Diskominfo	
		Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	175.000.000	0	-	4	34.000.000	1	8.050.000	1	6.950.000	1	7.500.000	4	11.500.000	34.000.000	4	34.000.000	25%	19,43%	Diskominfo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		600%	24.036.894.894	200%	7.805.790.090	100%	3.433.184.756	12,51%	429.502.617	35,73%	1.226.722.648	18,27%	627.318.293	931.678.190	93,65%	3.215.221.748	293,65%	49%	45,85%	Diskominfo	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	72	22.620.444.894	12	7.406.770.090	12	3.217.254.856	3	376.252.617	3	1.173.247.648	3	577.268.293	875.338.190	12	3.002.106.748	24	10.408.876.838	33%	46,02%	Diskominfo
		Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan	72	941.340.000	12	307.320.000	12	170.080.000	3	43.770.000	3	44.010.000	3	40.750.000	41.550.000	12	170.080.000	24	477.400.000	33%	50,71%	Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja program dan kegiatan	10	275.100.000	2	91.700.000	2	45.849.900	1	9.480.000	1	9.465.000	1	9.300.000	14.790.000	4	43.035.000	6	134.735.000	60%	48,98%	Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15	200.000.000	3	-	3	-	0	-	0	-	0	-	-	0	3	-	20%	0,00%	Diskominfo	

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		600%	435.000.000	200%	24.000.000	100%	27.000.000	0,00%	-	100,00 %	27.000.000	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	27.000.000	300,00%	51.000.000	50%	11,72%	Diskominfo
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	60	135.000.000	60	24.000.000	60	27.000.000	0	-	60	27.000.000	0	-	0	-	60	27.000.000	120	51.000.000	200%	37,78%	Diskominfo
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tercapainya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	#DIV/0!	Diskominfo	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0,00%	Diskominfo	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	600%	4.997.621.692	200%	1.186.057.092	100%	616.533.200	14,39%	88.745.050	33,02%	203.595.636	16,16%	99.633.130	36,06%	222.315.164	99,63%	614.278.980	299,63%	1.800.336.072	50%	36,02%	Diskominfo
		Penyediaan Komponen Intalasi Listrk/Penerangan Bangunan Kantor	Terbayarnya Penyediaan Komponen Intalasi Listrk/Penerangan Bangunan Kantor	173	28.044.106	8	6.088.257	8	4.955.750	2	933.750	2	933.750	2	3.088.250	2	-	8	4.955.750	16	11.044.007	9%	39,38%	Diskominfo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	300	200.000,054	50	61.917,791	50	59.432.000	15	10.731.000	10	10.470.000	10	3.000.000	15	35.231.000	50	59.432.000	100	121.349,791	33%	60,67%	Diskominfo

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	833		138		2	1	1	1	1	1	1	4		142	17%	32,11%	
					131.400.000		24.200.000		18.000.000	4.620.000	4.600.000	4.600.000	4.170.000			17.990.000	42.190.000			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10972	131.561.532	8	37.865.244	8	0	3		0	5	21.615.900	8	24.165.900	62.031.144	0%	47,15%	Diskominfo
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	35	45.000.000	7	12.000.000	7	0	0		0	7	4.200.000	7	4.200.000	16.200.000	40%	36,00%	Diskominfo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	60	4.341.616.000	12	1.043.985.800	12	2	3		3	4	157.098.264	12	503.535.330	1.547.521.130	40%	35,64%	Diskominfo
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	120.000.000	0	-	0	0	0		0	0	-	0	-	-	0%	0,00%	Diskominfo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		600%	2.875.000.000	200%	197.146.626	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	99,96%	58.250.000	99,96%	58.250.000	255.396.626	50%	8,88%	Diskominfo
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15	590.000.000	1	8.379.900	2	0	0		0	2	58.250.000	2	58.250.000	66.629.900	20%	11,29%	Diskominfo
		Pengadaam Mebel		25	245.000.000	14	23.294.726	0	0	0		0	0	-	0	-	23.294.726	56%	9,51%	Diskominfo

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	1.200.000.000	1	18.472.000	0	-	0	0	-	0	-	0	-	1	18.472.000	100%	1,54%	Diskominfo
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20	840.000.000	3	30.000.000	0	-	0	0	-	0	-	0	-	3	30.000.000	15%	3,57%	Diskominfo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		600%	718.211.265	200%	210.722.590	100%	134.805.000	22,68%	30.572.551	24,38%	32.859.117	31.833.113	36.832.690	97,99%	132.097.471	342.820.001	50%	47,73%	Diskominfo
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	72	23.700.000	12	5.700.000	12	2.850.000	3	380.000	3	750.000	500.000	1.200.000	12	2.830.000	8.530.000	33%	35,99%	Diskominfo
		Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	479.000.000	12	144.000.000	12	91.200.000	3	20.838.551	3	20.944.117	23.143.113	23.586.690	12	88.512.471	232.512.471	33%	48,54%	Diskominfo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	215.511.265	12	61.022.530	12	40.755.000	3	9.354.000	3	11.165.000	8.190.000	12.046.000	12	40.755.000	101.777.530	33%	47,23%	Diskominfo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		600%	1.432.718.700	200%	546.477.500	100%	246.188.400	26,93%	66.301.300	17,24%	42.438.000	47.638.000	89.012.800	99,67%	245.382.100	791.858.600	50%	55,27%	Diskominfo
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelancaran Kegiatan Organisasi	120	874.850.000	0	283.847.000	19	165.194.000	8	57.301.300	2	21.240.000	23.300.000	62.623.800	19	164.465.100	448.312.100	16%	51,24%	Diskominfo

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelancaran Kegiatan Organisasi	180	218.081.700	22	60.634.500	22	34.994.400	0	-	6	12.198.000	12	15.330.000	4	7.450.000	22	34.978.000	44	95.612.500	24%	43,84%	Diskominfo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelancaran Kegiatan Organisasi	6	339.788.000	0	201.996.000	1	46.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	18.939.000	4	45.939.000	4	247.935.000	67%	72,97%	Diskominfo
2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		600%	49.194.708.850	200%	6.510.849.700	100%	3.244.034.800	9,06%	293.848.405	27,31%	886.075.000	29,95%	971.479.800	33,28%	1.079.477.500	99,59%	3.230.880.705	299,59%	9.741.730.405	50%	19,80%	Diskominfo
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		600%	49.194.708.850	200%	6.510.849.700	100%	3.244.034.800	9,06%	293.848.405	27,31%	886.075.000	29,95%	971.479.800	33,28%	1.079.477.500	99,59%	3.230.880.705	299,59%	9.741.730.405	50%	19,80%	Diskominfo
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	terbangunnya citra pemerintah kabupaten tanjung jabung barat melalui opini publik	24	331.750.000	0	81.500.000	4	45.875.000	1	6.975.000	1	6.975.000	1	6.975.000	1	19.880.000	4	40.805.000	4	122.305.000	17%	36,87%	Diskominfo
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyiaran	24	258.900.000	0	78.850.000	4	39.450.000	1	4.650.000	1	4.650.000	1	12.320.000	1	15.788.250	4	37.408.250	4	116.258.250	17%	44,90%	Diskominfo
		Pelayanan Informasi Publik	Ketersediaan informasi dan meningkatnya layanan informasi publik	24	288.968.000	0	88.968.000	4	44.484.000	1	10.650.000	1	10.650.000	1	10.650.000	1	11.483.250	4	43.433.250	4	132.401.250	17%	45,82%	Diskominfo

		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	24	290.000.000	0	-	4	54.999.800	1	6.150.000	1	6.150.000	1	32.644.800	1	6.150.000	4	51.094.800	4	51.094.800	17%	17,62%	Diskominfo
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	40	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0%	0,00%	Diskominfo	
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	TerselenggaranyaP engelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	553.800.000	0	-	3	109.200.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	4	28.200.000	4	109.200.000	4	109.200.000	33%	19,72%	Diskominfo
		Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya Layanan Hubungan Media	24	42.147.000.000	0	5.110.750.000	4	2.572.200.000	1	198.959.351	1	715.650.000	1	791.000.000	4	865.650.000	4	2.571.259.351	4	7.682.009.351	17%	18,23%	Diskominfo
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Fasilitasi kemitraan layanan komunikasi publik	2590	3.824.290.850	0	870.781.700	500	377.826.000	25	39.464.054	200	115.000.000	35	90.890.000	240	132.326.000	500	377.680.054	500	1.248.461.754	19%	32,65%	Diskominfo
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kota		600%	450.000.000	200%	280.000.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	200,00%	-	280.000.000	33%	62,22%	Diskominfo	
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan/Pengad aan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28	450.000.000	0	280.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	280.000.000	0%	62,22%	Diskominfo	

3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		600%	22.580.140.000	200%	4.275.811.720	100%	1.915.663.600	2,93%	56.100.000	23,70%	454.065.000	26,20%	501.818.000	47,15%	903.214.500	99,98%	1.915.197.500	299,98%	6.191.009.220	50%	27,42%	Diskominfo
		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	264	19.116.340.000	0	4.275.811.720	0	1.915.663.600	2,93%	56.100.000	23,70%	454.065.000	26,20%	501.818.000	47,15%	903.214.500	99,98%	1.915.197.500	99,98%	6.191.009.220	0%	32,39%	Diskominfo
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tercapainya pengembangan, pemeliharaan dan jaringan telekomunikasi	264	19.116.340.000	0	3.466.861.720	44	1.671.344.000	31	24.150.000	31	414.115.000	31	406.808.000	31	825.979.500	124	1.671.052.500	124	5.137.914.220	47%	26,88%	Diskominfo
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		600%	2.213.800.000	200%	572.104.914	100%	244.319.600	13,08%	31.950.000	16,35%	39.950.000	38,89%	95.010.000	31,61%	77.235.000	99,93%	244.145.000	299,93%	816.249.914	50%	36,87%	Diskominfo
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan Data di Aplikasi Satu Data	264	281.100.000	0	46.850.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	44	-	44	46.850.000	17%	16,67%	Diskominfo	
		Kordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tercapainya Kordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	78	286.200.000	13	61.700.000	13	-	0	-	0	-	0	-	0	13	-	26	61.700.000	33%	21,56%	Diskominfo	
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	30	642.700.000	0	321.200.000	5	118.220.000	1	22.500.000	1	22.500.000	2	22.500.000	1	50.700.000	5	118.200.000	5	439.400.000	17%	68,37%	Diskominfo

		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Layanan Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanah Barat	72	594.600.000	0	272.000.000	12	77.899.800	3	1.950.000	3	9.950.000	55.950.000	3	9.955.000	12	77.805.000	12	349.805.000	17%	58,83%	Diskominfo
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tersedianya Portal Perangkat Daerah yang handal dan mutakhir	72	409.200.000	0	107.200.000	12	48.199.800	3	7.500.000	3	7.500.000	16.560.000	3	16.560.000	12	48.140.000	12	155.340.000	17%	37,96%	Diskominfo
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		600%	1.250.000.000	200%	42.500.000	100%	39.700.000	19,27%	7.650.000	19,27%	7.650.000	7.650.000	41,56%	16.500.000	99,37%	39.450.000	299,37%	81.950.000	50%	6,56%	Diskominfo
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya OPD Penyelenggara Statistik Sektoral	600%	1.250.000.000	200%	42.500.000	100%	39.700.000	19,27%	7.650.000	19,27%	7.650.000	7.650.000	41,56%	16.500.000	99,37%	39.450.000	299,37%	81.950.000	50%	6,56%	Diskominfo
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	44	1.250.000.000	44	42.500.000	44	39.700.000	44	7.650.000	44	7.650.000	7.650.000	44	16.500.000	176	39.450.000	220	81.950.000	500%	6,56%	Diskominfo
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGEMASAN INFOMASI		600%	1.000.000.000	200%	65.404.914	100%	37.599.800	22,34%	8.400.000	22,34%	8.400.000	8.400.000	32,45%	12.199.800	99,47%	37.399.800	299,47%	102.804.714	50%	10,28%	Diskominfo
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	600%	1.000.000.000	200%	65.404.914	100%	37.599.800	22,34%	8.400.000	22,34%	8.400.000	8.400.000	32,45%	12.199.800	99,47%	37.399.800	299,47%	102.804.714	50%	10,28%	Diskominfo

		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		264	500.000.000	44	65.404.914	44	37.599.800	44	8.400.000	44	8.400.000	44	8.400.000	44	12.199.800	176	37.399.800	220	102.804.714	83%	20,56%	Diskominfo
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		78	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0,00%	Diskominfo	

Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja

49,79%
Sangat Rendah

Faktor pendorong keberhasilan kinerja

- 1
- Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 2
- Berjalannya Pelayanan Administrasi perkantoran dengan lancar (rata-rata bulan)
- 3
- Terbangunnya Citra Pemerintah Kab. Tanjab Barat, melalui Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- 4
- Indikator Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyiaran, melalui Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 5
- Ketersediaan Informasi dan meningkatnya layanan informasi publik, melalui Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- 6
- Terselenggaranya Indikator Layanan Hubungan Media, melalui Kegiatan Layanan Hubungan Media
- 7
- Terwujudnya Fasilitasi Kemitraan Layanan Komunikasi Publik Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kab. Tanjab Barat, melalui Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- 8
- Terwujudnya indikator Jumlah OPD yang menyampaikan data di aplikasi Satu Data, melalui Kegiatan Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah.
- 9
- Tercapainya pengembangan pemeliharaan telematika dan jaringan telekomunikasi, melalui Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- 10
- Jumlah Kecamatan yang terlayani dengan Sandi dan Radio SSB dan Penyediaan pelayanan Jasa Sandi, melalui Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- 11
- Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Database di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanjab Barat, melalui Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 12
- Tersedianya Layanan Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjab Barat, melalui Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 13
- Tersedianya Portal Perangkat Daerah yang handal dan mutakhir, melalui Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Faktor penghambat pencapaian kinerja

- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan
- 1
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka menunjang kegiatan skill tertentu
- 2
- Belum adanya pelatihan atau pun bimbingan teknis
- 3
- Regulasi LPPL Radio Kab. Tanjung Jabung Barat yang menyebabkan Dinas Kominfo tidak bisa menganggarkan untuk pengembangan LPPL Radio
- 4
- Keterbatasan jaringan dengan penyelenggaraan SPBE di lingkup Kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat
- 5
- Topografi wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat yang memiliki hutan yang luas, rawa dan wilayah perairan baik sungai dalam rangka menunjang kegiatan jaringan internet dalam kecamatan
- 5
- Kurangnya pegawai ASN staf pelaksana dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
- 6

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *):

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Renja tahun 2025 merupakan tahun keempat perencanaan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.

Pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025 sebagian besar sesuai dengan Renja Dinas Kominfo Tahun 2025 dan secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Tabel 2.3
Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Partisipasi aktif lembaga komunikasi Publik dalam pengelolaan komunikasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang memiliki aplikasi E-Government	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82	82	82	82	82
			Nilai AKIP Diskominfo	60	65	70	71	72	75

Dari 2 sasaran yang ditetapkan dalam pengimplementasiannya pada sasaran strategis dengan formulasi sebagai berikut :

1. Formulasi pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah

- a. Persentase Partisipasi aktif lembaga komunikasi Publik dalam pengelolaan komunikasi Publik. Perbandingan Selisih Antara Jumlah Lembaga komunikasi Publik yang berpartisipasi aktif dibagi dengan Jumlah Lembaga yang terverifikasi Lalu Dikali Seratus Persen. Untuk lebih jelas berikut formulasinya:

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga komunikasi Publik yang berpartisipasi aktif}}{\text{Jumlah Lembaga yang terverifikasi}} \times 100\%$$

- b. Persentase OPD yang memiliki aplikasi E-Government adalah Perbandingan antara Jumlah Jumlah OPD yg menggunakan aplikasi e-Government dengan Jumlah Jumlah OPD Kab. Tanjab Barat dikali seratus persen. Untuk lebih jelas berikut formulasinya :

$$\frac{\text{Jumlah OPD yg menggunakan aplikasi e-Government}}{\text{Jumlah OPD Kab. Tanjab Barat}} \times 100\%$$

2. Formulasi pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan adalah

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Perbandingan antara Total Nilai dasar persepsi per unsur dengan Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang. Untuk lebih jelas berikut formulasinya :

$$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times 100\%$$

- b. Nilai AKIP Diskominfo adalah Hasil Penilaian dari Tim Evaluasi SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas untuk melengkapi tahapantahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identitas isu penting dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu penting ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

2.4.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat sampai tahun 2022, masih belum dikatakan dapat tercapai semuanya. Hal ini terjadi karena masih sedikitnya dukungan anggaran dari Pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya SDM yang berkemampuan dalam urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.

2.4.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat dilihat berdasarkan masing-masing urusan yaitu:

a. Urusan Komunikasi dan Informasi

- 1) Rendahnya SDM yang berkompeten dalam komunikasi dan informatika.
- 2) Pengelolaan E-Government yang belum optimal.
- 3) Banyaknya aplikasi pemerintah yang belum terintegrasi dan belum terkelola dengan baik.
- 4) Terbatasnya jumlah titik hotspot internet publik area.
- 5) Fungsi PPID pada setiap OPD yang belum optimal.
- 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik yang memadai.
- 7) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan informasi daerah dan komunikasi publik.
- 8) Belum optimalnya pengelolaan layanan monitoring isu publik di media.

b. Urusan Statistik

- 1) Belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral.
- 2) Belum terbangunnya sistem big data.
- 3) Belum tersedianya tenaga yang berkompeten di bidang statistik.
- 4) Masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan statistik sektoral.

c. Urusan Persandian

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam penyampaian informasi yang bersifat rahasia.
- 2) Kurangnya peralatan untuk persandian dalam mengamankan informasi.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan pengamanan informasi.
- 4) Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang persandian atau pengamanan informasi.

2.4.3 Dampak Terhadap Capaian Pemerintah Pusat dan Daerah

Dampak dari hambatan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tanjung Jabung Barat terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah belum tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat. Sehingga membuat misi yang ditetapkan Kepala Daerah tidak tercapai. Selain itu hambatan juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian program Pemerintah Pusat. Hal ini terjadi karena capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan SPM dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang harus di dukung oleh Pemerintah Daerah.

2.4.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan:

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem aplikasi dalam menerapkan E-Government.
2. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi.
3. Penyebaran informasi kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel.

4. Kesenjangan kemampuan TIK Masyarakat.
5. Jaminan keamanan sistem TIK

Peluang:

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi dari Kemenkominfo RI tentang TIK.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
3. Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM.
4. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
5. Penyelenggaraan statistik sektoral.
6. Penerapan fungsi GPR (government public relations).
7. Edukasi internet sehat dan aman, kreatif dan produktif.
8. Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah.
9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

2.4.5 Penentuan Isu-Isu Penting

Isu penting merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu penting yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya aplikasi e-government yang belum terintegrasi dan belum terkelola dengan baik.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
4. Belum optimalnya penyediaan statistik sektoral.
5. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam penyampaian informasi yang bersifat rahasia.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Kab. Tanjung Jabung Barat. Maka tujuan pembangunan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ingin dicapai yaitu: Menjadikan bidang Komunikasi dan Informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK Nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
2. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dari sasaran-sasaran tersebut maka arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penggunaan TIK sebagai pendukung utama sektor strategis nasional. Dalam hal ini kaitannya dengan penyediaan infrastruktur internet publik dan peningkatan sarana dan prasarana TIK untuk masyarakat.
2. Mendorong pemanfaatan TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan TIK bagi UMKM, petani dan nelayan. Dalam hal ini memajukan perekonomian masyarakat yang lebih inovatif dan berteknologi tinggi melalui penggunaan sarana dan prasarana TIK.

3. Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan etransportasi. Hal ini kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat menuju Tanjung Jabung Barat Smart City.
4. Menyebarkan pada publik narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini berkaitan dengan penyampaian berita atau informasi publik mengenai kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat melalui media dan website resmi pemerintah.
5. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Dalam hal ini berkaitan dengan data-data sektoral Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat yang disusun dalam sebuah dokumen.
6. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat memanfaatkan wadah yang ada di masyarakat melalui pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

3.2 Sinkronisasi Program Antara RPJMD, RENJA dan RKA

Upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat periode 2021 s.d 2026 yaitu Menuju Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis). Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung **Misi III** yaitu: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.

Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa program. Adapun program yang disusun selaras antara RPJMD, RENJA dan RKA untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sinkronisasi Program, Indikator dan Target RPJMD, RENJA dan RKA Tahun 2024

VISI : MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

MISI III : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Untuk Pelayanan Publik.

No.	Program RPJMD	Indikator	Target Kinerja	Program Renja	Indikator	Target Kinerja	Program RKA	Indikator	Target Kinerja
Sasaran Strategis: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik									
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	4 Media	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	4 Media	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	4 Media
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Tanjab Barat	44 OPD/ 134 Desa/ Kelurahan/ Aplikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Tanjab Barat	44 OPD/ 134 Desa/ Kelurahan/ Aplikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Tanjab Barat	44 OPD/ 134 Desa/ Kelurahan/ Aplikasi
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah OPD dengan Sistem dan Statistik Data yang Terintegrasi	44 OPD	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah OPD dengan Sistem dan Statistik Data yang Terintegrasi	44 OPD	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah OPD dengan Sistem dan Statistik Data yang Terintegrasi	44 OPD
4.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Persandian	56%	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Persandian	56%	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Persandian	56%

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan uraian dan implementasi dari misi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dapat disampaikan sebagai berikut: Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sasaran adalah penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur, untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan sistem informasi melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi.
2. Terselenggaranya penyediaan jaringan interkoneksi pada OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Meningkatnya layanan informasi pembangunan daerah (SIMDA) yang handal, berdaya dan berhasil guna yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi berbasis website, audio dan audio visual dengan dukungan pendanaan yang memadai.
5. Meningkatnya diseminasi data statistik sektoral dan mutu statistik daerah yang terintegrasi
6. Tersedianya layanan keamanan informasi pemerintahan berbasis elektronik dan non elektronik.

Untuk mencapai tujuan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Membangun Jaringan Komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Meningkatkan jumlah OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat terhubung jaringan internet
3. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4. Mengembangkan dan menyelenggarakan system pelayanan informasi publik
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kab. Tanjung Jabung Barat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media.
8. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang TIK

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target RENJA Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaras dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target RENSTRA.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kominfo

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Target Renja 2024
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Partisipasi aktif lembaga komunikasi Publik dalam pengelolaan komuniikasi Publik	100%	100%
			Persentase OPD yang memiliki aplikasi E-Government	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82
			Nilai AKIP Diskominfo	71	71

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka disusun program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang akan dicapai, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Persentase Partisipasi aktif lembaga komunikasi Publik dalam pengelolaan komunikasi Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Pelayanan Informasi Publik
				Layanan Hubungan Media
				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
				Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.	Persentase OPD yang memiliki aplikasi E-Government	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
				Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
				Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 program dan kegiatan telah mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mempunyai beberapa program mengacu pada RENSTRA Dinas Koinfo Tahun 2021-2026 diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Untuk Menunjang program-program diatas, Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa kegiatan-kegiatan dan sub-sub kegiatan untuk Tahun 2025 yaitu:

1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

	Sub Kegiatan :	1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2) Pengadaan Mebel 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

	Sub Kegiatan :	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 3) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5) Pelayanan Informasi Publik 6) Layanan Hubungan Media 7) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 8) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 9) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 10) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
10.	Kegiatan Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	1) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

		2) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 4) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 6) Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
11.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Rumusan Rencana Pendanaan

Program / kegiatan akan berjalan sesuai tujuan dan sasaran dengan dukungan dalam penganggaran. Pendanaan pada setiap program / kegiatan berdasarkan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai. Adapun Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2026	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	DISKOMINFO	100%	6.918.791.071	APBD		100%	6.523.791.071
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	DISKOMINFO	65 Kategori	126.920.000	APBD		70 Kategori	126.920.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKOMINFO	2 Dokumen	30.000.000	APBD		2 Dokumen	30.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISKOMINFO	5 Laporan	61.920.000	APBD		5 Laporan	61.920.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISKOMINFO	4 Laporan	35.000.000	APBD		4 Laporan	35.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan dan pelaporan yang disusun	DISKOMINFO	100%	4.194.444.149	APBD		100%	4.194.444.149
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DISKOMINFO	32 Orang/Bulan	3.943.594.149	APBD		35 Orang/Bulan	3.938.594.149

	5	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISKOMINFO	12 Dokumen	165.000.000	APBD		12 Dokumen	170.000.000
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISKOMINFO	2 Laporan	45.850.000	APBD		2 Laporan	45.850.000
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DISKOMINFO	3 Laporan	40.000.000	APBD		3 Laporan	40.000.000
	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISKOMINFO	100%	112.000.000	APBD		100%	112.000.000
	8	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DISKOMINFO	60 Paket	27.000.000	APBD		60 Paket	27.000.000
	9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DISKOMINFO	3 Dokumen	35.000.000	APBD		3 Dokumen	35.000.000
	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DISKOMINFO	10 Orang	50.000.000	APBD		10 Orang	50.000.000
	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berjalannya Pelayanan Administrasi perkantoran dengan lancar (rata-rata bulan), Kinerja Perangkat Daerah dan Keuangan	DISKOMINFO	100%	955.926.922	APBD		100%	960.926.922
	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DISKOMINFO	8 Paket	5.000.000	APBD		8 Paket	5.000.000

12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DISKOMINFO	50 Paket	40.000.000	APBD		50 Paket	45.000.000
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DISKOMINFO	2 Paket	25.000.000	ABPD		2 Paket	25.000.000
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DISKOMINFO	8 Paket	21.926.922	ABPD		8 Paket	21.926.922
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DISKOMINFO	7 Dokumen	9.000.000	ABPD		7 Dokumen	9.000.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISKOMINFO	12 Laporan	825.000.000	ABPD		12 Laporan	825.000.000
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISKOMINFO	12 Dokumen	30.000.000	ABPD		12 Dokumen	30.000.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	100%	810.000.000	APBD		100%	410.000.000
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DISKOMINFO	15 unit	150.000.000	APBD		15 Unit	150.000.000
19	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DISKOMINFO	25 Unit	60.000.000	APBD		25 unit	60.000.000
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DISKOMINFO	1 Unit	400.000.000	ABPD		0	0
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DISKOMINFO	20 Unit	200.000.000	ABPD		20 Unit	200.000.000

		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung kendaraan Dinas	DISKOMINFO	8 Unit	0				-
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	DISKOMINFO	100%	129.500.000	ABPD		100%	129.500.000
22		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISKOMINFO	12 Laporan	4.500.000	APBD		12 Laporan	4.500.000
23		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DISKOMINFO	12 Laporan	85.000.000	APBD		12 Laporan	85.000.000
24		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DISKOMINFO	12 Laporan	40.000.000	ABPD		12 Laporan	40.000.000
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	DISKOMINFO	100%	590.000.000	ABPD		100%	590.000.000
25		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DISKOMINFO	20 Unit	150.000.000	ABPD		20 Unit	150.000.000
26		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DISKOMINFO	30 Unit	40.000.000	APBD		30 Unit	40.000.000
27		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DISKOMINFO	1 Unit	400.000.000	APBD		1 Unit	400.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								

	II.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	DISKOMINFO	4 Media	10.205.000.000	APBD		4 Media	10.205.000.000
	II.8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi, Telekomunikasi dan opini publik	DISKOMINFO	4 Media	10.205.000.000	APBD		4 Media	10.205.000.000
	28	<i>Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>	DISKOMINFO	4 Dokumen	65.000.000	APBD		4 Dokumen	65.000.000
	29	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	DISKOMINFO	10 Dokumen	150.000.000	APBD		10 Dokumen	150.000.000
	30	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	DISKOMINFO	3 Dokumen	138.450.000	APBD		3 Dokumen	138.450.000
	31	<i>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	DISKOMINFO	4 Dokumen	45.000.000	APBD		4 Dokumen	45.000.000
	32	Pelayanan Informasi Publik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</i>	DISKOMINFO	4 Dokumen	50.000.000	APBD		4 Dokumen	50.000.000
	33	Layanan Hubungan Media	<i>Jumlah Layanan Hubungan Media</i>	DISKOMINFO	4 Layanan	8.886.550.000	APBD		4 Layanan	8.886.550.000
	34	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</i>	DISKOMINFO	500 Dokumen	700.000.000	APBD		500 Dokumen	700.000.000
	35	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	<i>Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	DISKOMINFO	8 Orang	0	APBD		8 Orang	0

	36	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan</i>	DISKOMINFO	4 Dokumen	70.000.000	APBD		4 Dokumen	70.000.000
	37	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	DISKOMINFO	7 Unit	100.000.000	APBD		7 Unit	100.000.000
	III.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	<i>Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Tanjab Barat</i>	DISKOMINFO	44 Unit	4.088.650.000	APBD		44 Unit	4.088.650.000
	III.9	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jaringan Komunikasi Data dan Bandwith	DISKOMINFO	44 Unit	3.500.000.000	APBD		44 Unit	3.500.000.000
	38	<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	DISKOMINFO	44 Unit	3.500.000.000	APBD		44 Unit	3.500.000.000
	III.10	Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terkelolanya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah</i>	DISKOMINFO	44 Unit	588.650.000	APBD		44 Unit	588.650.000
	39	<i>Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan</i>	DISKOMINFO	44 Dokumen	200.000.000	APBD		44 Dokumen	200.000.000
	40	<i>Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola</i>	DISKOMINFO	44 Unit	46.850.000	APBD		44 Unit	46.850.000

	41	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	DISKOMINFO	13 Perangkat Daerah	47.700.000	APBD		13 Perangkat Daerah	47.700.000
	42	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	DISKOMINFO	5 Unit	125.000.000	APBD		5 Unit	125.000.000
	43	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	DISKOMINFO	12 Dokumen	99.100.000	APBD		12 Dokumen	99.100.000
	44	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	DISKOMINFO	12 Dokumen	70.000.000	APBD		12 Dokumen	70.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
	IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>	DISKOMINFO	100%	250.000.000	APBD		100%	250.000.000
	IV.11	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi</i>	DISKOMINFO	100%	250.000.000	APBD		100%	250.000.000
	45	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	DISKOMINFO	4 Dokumen	250.000.000	APBD		4 Dokumen	250.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								

	V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	DISKOMINFO	100%	200.000.000	APBD		100%	200.000.000
	V.12	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	DISKOMINFO	100%	200.000.000	APBD		100%	200.000.000
	46	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	DISKOMINFO	13 Laporan	100.000.000	APBD		13 Laporan	100.000.000
	47	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	DISKOMINFO	44 Perangkat Daerah	100.000.000	APBD		44 Perangkat Daerah	100.000.000
JUMLAH TOTAL						Rp 21.662.441.071,00				Rp 21.267.441.071,00

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholders* terutama bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rancangan Renja 2025, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Hal-hal yang dapat dilakukan pada saat evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah target dan indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, aturan perundang-undangan dan tanpa mengubah tujuan dari tema pembangunan yang mengacu pada RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 harus benar-benar menjadi acuan kerja bagi bidang-bidang dan sub bidang secara khusus dan Dinas Komunikasi dan Informatika pada umumnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua dapat melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, kredibel dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) Diskominfo dan kinerja pegawainya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rancangan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah

di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Kuala Tungkal, Juli 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



JOAN PRAYUDA, SE., MM
Pembina Tk.I (IV/b)
19810829 201001 1 010